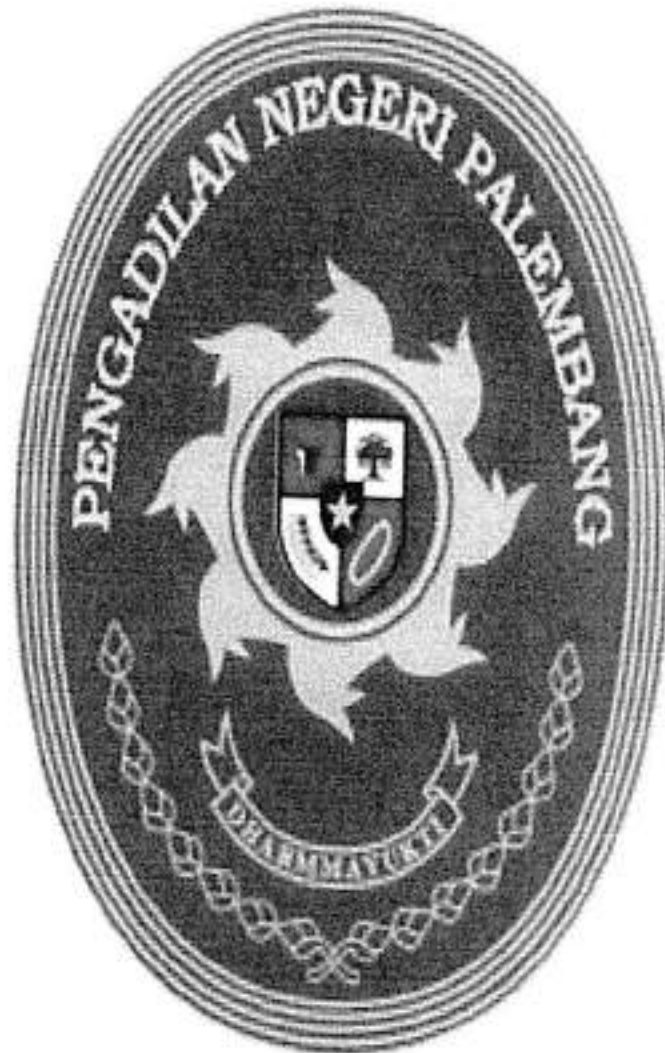


# LAPORAN

## SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI TERHADAP PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



JANUARI - JUNI 2021

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI**  
**TERHADAP PELAYANAN PADA**  
**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Disahkan di Palembang  
pada hari Kamis, 1 Juli 2021



Wakil Ketua Team

**YETTY IRIANI SIREGAR, SH**  
**NIP. 196304271986032001**

Ketua Team

**ABU HANIFAH, SH.,MH**  
**NIP. 196704291996031001**

## KATA PENGANTAR

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya Peningkatan Kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah mencanangkan program Akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan seperti telah tertuang pada surat Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/DJU/OT01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi di lingkungan Badan Peradilan Umum maka perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Program penjaminan mutu tersebut dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing pelayanan satuan kerja instansi Pengadilan juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik pada Pengadilan.

Oleh karena itu adanya kuisioner ini diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan Pengadilan Negeri Palembang Semoga bermanfaat bagi unit pelayanan instansi pemerintahan maupun masyarakat.

Palembang, 1 Juli 2021

Ketua Team



ABU HANIFAH, SH.,MH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
<b>BAB I.....</b>	<b>5</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
Latar Belakang .....	4
Maksud dan Tujuan .....	5
Landasan Hukum .....	5
Persiapan .....	5
Pelaksanaan Pengumpulan Data .....	7
Metode Survei.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>METODOLOGI.....</b>	<b>8</b>
Metode Penelitian .....	8
Populasi dan Sampel.....	8
Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	8
Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	8
Teknik Analisis Data .....	9
Tahapan pelaksanaan .....	9
<b>BAB III.....</b>	<b>12</b>
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI .....</b>	<b>12</b>
Profil responden.....	12
Indeks persepsi korupsi per indikator .....	15
Indeksi persepsi korupsi satuan kerja pada pengadilan .....	19
<b>BAB IV .....</b>	<b>20</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>20</b>
Kesimpulan.....	20
Rekomendasi.....	20

## BAB I PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

#### **LANDASAN HUKUM**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.  
Rencana Kerja

#### **PERSIAPAN**

Sebelum pelaksanaan survei persepsi korupsi berikut ini telah dilakukan beberapa persiapan sebagai berikut.

##### **1. Penetapan Pelaksana**

Dilaksanakan Sendiri, survei persepsi korupsi dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan Sumber Daya Manusia (SDM yang dimiliki PN Palembang ;

##### **Penyiapan Bahan**

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
- c. Kelengkapan peralatan.

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data



- Jumlah Responden, target responden khusus pengguna layanan utama pengadilan adalah sebanyak 150 responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
  - a. Lokasi pengumpulan data terpusat pada lingkungan Pengadilan Negeri Palembang yaitu, pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan aplikasi si-super ;
  - b. Waktu pengumpulan dilakukan mulai tanggal 1 April 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

#### **PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA**

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Pengujian kualitas dan validitas data. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **METODE SURVEI**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

## **BAB II METODOLOGI**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian indeks Persepsi Korupsi (IRK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### **POPULASI DAN SAMPEL**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### **LOKASI PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Palembang

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN QUALITY CONTROL.**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana melalui sistem aplikasi Si-Super;



## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data Persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4 dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling Negeri dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan indeks Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total cen masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini, Kedua mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

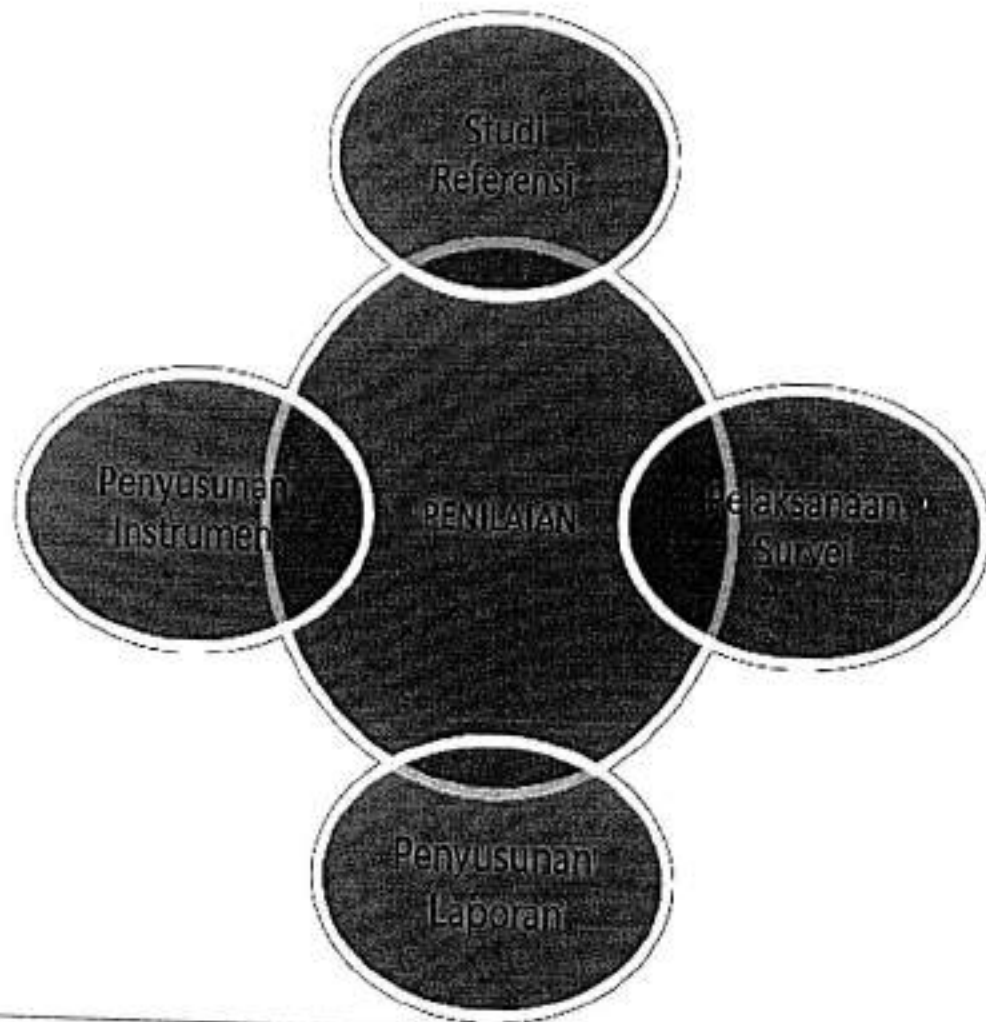
Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## **TAHAP PELAKSANAAN**

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan-Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



**Tabel 2**  
**Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi**

NOMOR	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**Profil responden**

**Tingkat pendidikan responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas sebanyak 90% memiliki pendidikan Sarjana (S1).

**Tabel 4**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1	Tidak Mengisi Tingkat Pendidikan	0	0
2	Tidak Sekolah	0	0
3	SD	1	0,1
4	SLTP	1	0,1
5	SLTA	26	0,26
6	D1/D2/D3/D4	0	0
7	S1	90	0,9
8	S2	3	0,03
9	S3	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	

#### ❖ Pekerjaan

Dari Sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 56% responden pengguna layanan adalah advokat;

**Tabel 5**  
**Jenis Pekerjaan Responden**

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	HAKIM	0	0
2	PNS	9	0,09
3	TNI/POLRI	0	0
4	PEGAWAI SWASTA	22	0,22
5	WIRASWASTA	9	0,09
6	ADVOKAT/LAINNYA	56	0,56
7	PEDAGANG	0	0
8	PELAJAR/MAHASISWA	0	0
9	TIDAK MENGISI KOLOM PEKERJAAN	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	

#### ❖ Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Palembang sebanyak 120 responden;

**Tabel 6**  
**Domisili Responden**

NO	DOMISILI	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Palembang/ Sumsel	120	1,2
2	Jawa Barat	1	0,01
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	

❖ **Kelompok Usia Responden**

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18-28 tahun sebanyak 23 responden, usia antara 29-39 tahun sebanyak 56 responden, usia 40-49 tahun sebanyak 32 responden, usia 50-59 tahun sebanyak 8 responden, usia 60-69 tahun sebanyak 1 responden;

**Tabel 7**  
**Usia Responden**

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	18-28 Tahun	23	0,23
2	29-39 Tahun	56	0,56
3	40-49 Tahun	32	0,32
4	50-59 Tahun	8	0,08
5	60-69 Tahun	1	0,01
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	



## Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

### 1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.00;

Indeks ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	121	100
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	0	0
JUMLAH				121	

### 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3.99 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	120	99,2
2	Sering	B	3	1	0.8
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	0	0
JUMLAH				121	

### 3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3.99;

Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	121	100
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>121</b>	

#### 4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.00 Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	121	100
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>121</b>	

#### 5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,97 Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	120	99,2
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	1	0,8
<b>JUMLAH</b>				<b>121</b>	

### 6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.92 Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	118	97.5
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	3	2.5
JUMLAH				121	

### 7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.00 Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	121	100
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	0	0
JUMLAH				121	

### 8. Indikator Pencaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator pencaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.00 Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	121	100
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0

4	Tidak ada	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>121</b>	

### 9. Indikator perbuatan curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 3.96 Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	119	98,4
2	Sering	B	3	1	0.8
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	1	0.8
<b>JUMLAH</b>				<b>121</b>	

### 10. Indikator Transaksi rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.00 Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bersih dari korupsi.

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	121	100
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak ada	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>121</b>	

### Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan

Dari Indeks 10 Indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palembang sebesar "99,75"

Tabel 18  
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja  
Pada Pengadilan Negeri Palembang

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA-RATA	SKOR RATA-RATA TERTIMBANG	KATEGORI
1	MANIPULASI	4,00	0,40	BERSIH DARI KORUPSI
2	PENYALAGUNAAN	3,99	0,39	BERSIH DARI KORUPSI
3	MENJUAL PENGARUH	3,99	0,39	BERSIH DARI KORUPSI
4	TRANSASKI BIAYA	4,00	0,40	BERSIH DARI KORUPSI
5	BIAYA TAMBAHAN	3,97	0,39	BERSIH DARI KORUPSI
6	HADIAH	3,92	0,39	BERSIH DARI KORUPSI
7	TRANSPARASI BIAYA	4,00	0,40	BERSIH DARI KORUPSI
8	PENCALOAN	4,00	0,40	BERSIH DARI KORUPSI
9	PERBUATAN CURANG	3,96	0,39	BERSIH DARI KORUPSI
10	TRANSASKI RAHASIA	4,00	0,40	BERSIH DARI KORUPSI

Indeks "3,99" tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan "Bersih dari Korupsi" Nilai interval konversi indeks persepsi korupsi angka "81.26-100.00"

## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memiliki Indeks Persepsi Korupsi **99,75** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**

Indeks persepsi korupsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat 4.00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.99
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.99
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.00
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.97
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.92
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.00
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.96
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.00

### REKOMENDASI

Berdasarkan Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, tahun 2021 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki Indeks di atas 3,90 atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **“Hadiah” (3.92 poin)** dan **“Perbuatan Curang ” (3.96 poin)** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.